

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

ASNLF (*Acheh Sumatra National Liberation Front*) berdiri pada 4 Desember 1976 dan perjuangannya tersebut berakhir pada 15 Agustus 2005 lalu. Secara resmi nama dari gerakan ini yaitu ASNLF, namun sapaan dari gerakan ini dipermudah ketika proses promosi dilakukan di Aceh yang menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) agar masyarakat lebih mudah dalam pengucapannya (Akbar, 2009, p. 55). Hingga saat ini Gerakan ASNLF masih tetap eksis, walaupun pada 15 Agustus 2005 kesepakatan damai telah terjadi, berselang enam tahun dari perdamaian gerakan ini aktif kembali dan tetap bermarkas di Eropa.

Mula-mula sebelum terbentuknya ASNLF, Aceh memang lebih dahulu telah di hadapkan dengan perang terlama sepanjang abad dengan Belanda kurun waktu 1873-1912 (Veer, 1985). Artinya, 69 tahun Aceh mengalami kemelut konflik dengan senjata dan bersimbah darah untuk perjuangan bangsanya.

Selama berlangsungnya perang antara Aceh dan Belanda, pada tahun 1903-1946 keadaan sosial di Aceh juga genting. Diakibatkan terjadinya perang saudara (*perang cumbok*) antara kelompok Ulama dan kelompok Kerajaan Aceh (*Ulee Balang*). Sekian waktu terjadinya Perang Cumbok tersebut, kelompok ulama berhasil memukul rata Ulee Balang. Didukung dengan terbentuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939, oleh Teungku Muhammad Daud Bereueh sekaligus diketuai beliau (Akbar, 2009, hal. 34). Lalu pada masa itu, tidak ada deklarasi resmi dari kerajaan maupun koalisi masyarakat yang mengatakan

kekuasaan Aceh sepenuhnya diserahkan kepada Tengku Daud. Namun, pertemuan sekelompok Ulama di bawah keorganisasian PUSA telah mengerahkan forum-forum penting terkait pembicaraan kemajuan untuk negeri Aceh (Kawilarang, 2010, hal. 150).

Setelah Indonesia mendeklarasikan proklamasi 1945, bedaulat sebagai Negara. Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno mendarat ke Aceh pada tahun 1949. Melakukan pembicaraan dengan Teungku Daud, yang dianggap pemimpin Aceh saat itu untuk menarik dukungan secara formil maupun materil demi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Hal terpentingnya juga, Soekarno meminta Aceh masuk dalam wilayah Indonesia dan akan memenuhi syarat apapun yang diminta oleh Teungku Daud. Salah satunya, Teungku meminta Aceh dibebaskan menjalankan syariat Islam (Ibrahimi, 1980, p. 164). Lalu, kesepakatan antara Soekarno dan Teungku Daud tidak dipenuhi. Didasari dengan menentang Aceh masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan gagalnya Republik Indonesia menjalankan hukum Islam (Reid, 1987, p. 338). Di sinilah puncak kemarahan Aceh kepada Indonesia. Disusul dengan meletusnya semangat masyarakat yang dinahkodai oleh Teungku Daud ketika mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai pelawanan kepada pemerintah pusat atas masalah kekuasaan dan ideologi.

Lantas, masalah ini yang melatarbelakangi terbentuknya ASNLF. Awalnya, inisiator gerakan politik ini yaitu Hasan Tiro. Saat itu, diamanahkan oleh Indonesia untuk bekerja di seksi Penerangan Konsulat Indonesia di PBB, New York. Beliau mendengar kabar dan informasi jika daerah Aceh sedang gawat atas tindakan represif pemerintahan Ali Sastroamidjojo terhadap gerakan Darul Islam yang salah

satunya dipelopori orang sekampungnya. Lalu, Hasan Tiro memulai perlawanannya perdananya dengan menyikapi untuk keluar sebagai konsulat Indonesia dan mengancam akan mendirikan konsulat baru, jalur diplomatik “Republik Islam Indonesia” (Missbach, 2012, hal. 54).

Ketiga alasan dan amarah besar Hasan Tiro ini, yang membesarkan niatnya untuk membentuk ASNLF. Di antaranya dimulai dari dendam perang antara Aceh dan Belanda, Penghianatan Soekarno terhadap Aceh dan Penyerangan terhadap gerakan pemberontakan Darul Islam. Setelah kewarganegaraan Hasan Tiro dicabut dan mendapatkan suaka dari Amerika. Momentum-74 yaitu keluarnya Resolusi PBB 1974 yang menyatakan *self-determination* yaitu hak menentukan nasib sendiri, memperkuat legalitas Hasan Tiro dan ASNLF untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan di luar Aceh. Resolusi ini juga dengan tegas melarang negara penjajah untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap bangsa-bangsa yang sedang menuntut hak penentuan nasib sendiri (Nur, 2013, p. 70).

Ketika ASNLF resmi didirikan pada tahun 1976, di Stockholm, Swedia. Gerakan politik pembebasan ini berkembang pesat dalam kontekstual internasional maupun dukungan masyarakat Aceh. Terbukti, gerakan ini mampu mendorong dan berkontribusi dalam pembentukan Unrepresented Nation People Organization (UNPO), sebagai ruang untuk bangsa-bangsa yang ingin memperjuangkan kedaulatannya di dunia internasional. Selain itu, ASNLF juga diisi dan dikonsolidasi oleh Diaspora yang sedang berdiam di luar negeri. Sekaligus menyepakati maksud ingin merdeka serta menarik dukungan masyarakat untuk bergabung dengan gerakan yang diterjemahkan atau disapa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Missbach, 2012, hal. 17).

Dukungan ini tidak main-main, datang dari berbagai kalangan yakni Ulama, Akademisi, Adat maupun pihak lainnya. Lalu indikator apa yang menghambat proses kemerdekaan ASNLF, sampai menghabiskan waktu yang cukup lama yakni 30 tahun. Apalagi kekuatan gerakan ini bertambah masif ketika Soeharto melakukan pendekatan militeristik dalam melumpuhkan gerakan ASNLF. Sehingga kemarahan masyarakat semakin memuncak. Lain pula ketika rezim soeharto jatuh, justru ASNLF lemah ketika jalur dialog dan negosiasi dibuka oleh pemerintah setelah reformasi.

Sampai muncul beberapa pertanyaan kepada ASNLF yang menyetujui mantan Presiden Finlandia, Marti Artisari, sebagai juru runding perdamaian RI-GAM. Seharusnya, ASNLF dapat memberikan peran kepada UNPO untuk diberikan kesempatan membantu jalannya negosiasi kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Maka dari pada itu, penelitian ini fokus untuk melihat sejauh mana upaya ASNLF dalam prosesnya memerdekakan Aceh dari Indonesia kurun waktu 1999-2019 yang menjadi fokus analisis, karena pemerintah mulai dominan melakukan pendekatan *soft power* dengan gerakan ini di masa itu. Tentunya, penulis akan melihat dalam ruang-ruang internasional dan meneliti pihak lainnya yang berkontribusi pada proses kemerdekaan ASNLF.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh dari Indonesia pada tahun 1999-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menemukan tolak ukur penting ASNLF dalam upaya memerdekakan Aceh dari Indonesia dengan argumen sementara atas tidak tercapainya, pada tahun 1999-2019. Seperti;

1. Menganalisis sejauh mana ASNLF melibatkan pihak domestik, asing atau aktor internasional lainnya dalam upaya membebaskan diri dari wilayah Indonesia; dan
2. Menelisik indikator-indikator yang mempengaruhi kegagalan ASNLF dalam membebaskan Aceh dari wilayah Indonesia.

Tujuan akhirnya, sebagai kontribusi dalam kajian keilmuan Hubungan Internasional, agar dapat dijadikan tambahan referensi baru bagi akademisi lainnya yang ingin mendalami kontekstual konflik serupa. Dengan konsep dan paparan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dalam penelitian ini.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, akan mengkaji dengan sudut pandang berbeda terhadap upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh dari Indonesia pada tahun 1999-2019, melalui teori *Transnational Advocacy Network* (TAN). Namun penelitian lainnya yang berkaitan, belum membahas secara spesifik sekaligus fokus terhadap ASNLF di masa-masa Indonesia mulai membuka diri. Adapun menyinggung, sekedar membongkar masalah internal ASNLF yang tidak objektif menilai permasalahannya, terlalu personalistik, sehingga resolusinya tidak empiris. Seperti catatannya Husaini Hasan (Hasan H. , 2015) dalam bukunya berjudul '*Dari Rimba Aceh ke Stockholm*'.

Sebagaimana kajian umum lainnya, hanya fokus membahas penyebab konflik dan mengapresiasi proses penyelesaian negara dalam melakukan perundingan damai. Maka, penulis menjawab antitesis kajian umum sebelumnya untuk membedah hambatan dan rintangan yang terjadi pada gerakan tersebut selama proses mencari pengakuan kemerdekaan di mata internasional melalui sudut pandang berbeda. Sudut pandang kali ini menjadikan ASNLF sebagai subjek utama dalam penelitian. Sebab, pelbagai analisis terdahulu belum signifikan menjadikan ASNLF sebagai subjek utama, terkhusus dalam upayanya meraih kemerdekaan. Maka daripada itu, maksud penelitian ini adalah menambah dan melengkapi kajian kontemporer, agar berimbang hasil analisis yang diperoleh.

1.5 Cakupan Penelitian

Sejak bermulanya ASNLF, di masa 1976-1998. Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, melakukan pendekatan militeristik (*Hard Power*) dalam menumbangkan ASLNF. Pada saat itu, negara tidak samasekali menduduki persoalan di antara kedua belah pihak. Namun konflik yang terjadi justru semakin memuncak. Berselang setelah rezim Soeharto jatuh, ada harapan baru rakyat Aceh pada negara. BJ Habibie saat itu sebagai Presiden ke-3 Indonesia yang menggantikan kekuasaan Soeharto, melepaskan Timor Timur dari Indonesia. Semangat itu pula diikuti oleh masyarakat Aceh untuk menuntut referendum.

Tepat pada tahun 1999, semasa pemilu Indonesia sedang bergulir. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sekalipun yang mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Presiden, menjanjikan wacana referendum Aceh yang diajukan oleh Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA). Wacana ini juga didukung penuh oleh tokoh elit Aceh, salah satunya deklarator dan panglima

ASNLF yakni Hasan Tiro dan Abdullah Syafi'i. Namun berselang di akhir tahun, awalnya pemerintahan Gus Dur, DPR secara resmi menyatakan tak akan merekomendasikan referendum kepada pemerintah (Tirto, 2019). Walaupun gagal referendum diwujudkan pada tahun 1999, organisasi SIRA yang tidak ada ikatan dengan ASNLF telah mewakili kepentingan vertikal antara organisasi dan masyarakat. Semangat ini terus memuncakkan perjuangan ASNLF, seketika Jeda Kemanusiaan pada tahun 2001 tidak diperpanjang. Jeda kemanusiaan (*Humanitarian Pause*) sendiri merupakan kesepakatan internasional pertama antara RI-ASNLF yang difasilitasi oleh LSM Internasional yakni Henry Dunant Centre (HDC) di Jenewa, Swiss (Tempo, 2003).

ASNLF semakin percaya diri ketika itu, masyarakat memberikan dukungan lebih kepada gerakan ini. Justru menjadi momentum besar terhadap gerakan ini, terutama dalam merekrut anggota barunya. Dukungan ini pula merambah kepada Diaspora Aceh di luar negeri hingga dukungan Libya dan Iran yang berperan mendistribusikan persenjataan (Tirto, 2017). Mengingat tahun 2002 daerah operasi militer diterbitkan kembali oleh pemerintahan Megawati. Dan berselang masuknya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya negara cenderung preventif dalam menyelesaikan konflik Aceh.

Ihwal penelitian ini, peneliti berfokus pada tahun 1999-2005 yang mana, pada masa tersebut ASNLF mengalami eskalasi perdamaian dan kemerdekaan. Pada akhirnya mereka menyepakati perdamaian dengan Indonesia. Justru, pada masa tersebut aliran semangat masyarakat meningkat dan berbagai macam aktor asing juga terlibat. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melihat sejauh mana upaya ASNLF pada masa tersebut melakukan perjuangannya.

Adapun, isu di rentang waktu 2019 masih sangat hangat untuk dibahas dalam kajian akademis kontemporer ini. Sebab, potensi masalah masih ada. Dibuktikan dengan masih tegaknya gerakan ASNLF di Swedia sampai saat ini (Serambi, 2019). Walaupun eksistensinya cenderung menurun. Lalu, mencuatnya aspirasi gagasan-gagasan referendum di Aceh tetap berkunjug datang selama proses damai telah terjadi (Kompas, 2019). Sehingga membuktikan dan memperkuat kajian ini masih layak untuk diteliti.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan akademis mengenai upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh dari Indonesia kurun waktu 1999-2019, belum spesifik fokus kepada gerakan ini. Adapun, terdapat beberapa kajian ilmiah yang sedikitnya menyinggung dan menjadi tolak ukur penelitian ini lebih kuat untuk dikaji secara mendalam mengenai gerakan ASNLF.

Salah satunya Edward Aspinal dan Harold Crouch, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia gagal melakukan perundingan dengan ASNLF, dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2003, disebabkan karena adanya kesenjangan yang sangat besar antara tujuan kedua belah pihak. Setidaknya banyak agenda yang direncanakan, namun semua pembicaraannya gagal dilakukan. Karena pemerintah kerap melakukan tekanan kepada ASNLF. Hal tersebut, yang meniatkan ASNLF dan masyarakat tidak percaya pada proses negosiasi dan perdamaian yang diajukan pemerintah Indonesia (Aspinal & Crouch, 2003, hal. 46).

Sementara Kristen E. Schulze, dalam satu jurnal pertamanya memaparkan alasan kegagalan negosiasi perdamaian, ihwal kedua belah pihak yaitu RI-GAM yang saling memiliki paradigma permusuhan. ASNLF melihat Indonesia sebagai

konstruksi buatan *Neo-colonial* sebagai negara Jawa. Sedangkan Indonesia merasa sangat NKRI dan melihat orang Aceh secara inheren pemberontak, fanatik agama dan konflik sebagai masalah keamanan belaka. Akibatnya dari pada itu, ASNLF tidak tertarik melakukan negosiasi Pra-2005 (Schulze, 2007, hal. 82).

Adapun jurnal Kristen E. Schulze selanjutnya, menelisik secara ilmiah bahwa pemerintah telah memperkenalkan enam titik rencana yang komprehensif melalui inpres 4 pada April 2001. Bertujuan untuk mengatasi konflik melalui langkah-langkah politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan keamanan, mulai berlaku pada tahun 2002. Namun, ASNLF sama sekali menolak otonomi yang diberikan pemerintah dan secara aktif juga berusaha merusak implementasinya. Lalu, alasan ASNLF menerima beberapa dialog penting, terutama perjanjian menurunkan senjata, di Jenewa, 9 Desember 2003. Karena dialog tersebut sengaja ditampakkan kepada dunia internasional, untuk menarik aktor asing agar menggarisbawahi tujuan ASNLF selama ini khususnya kepada dunia barat, sekaligus memberi tekanan pada Indonesia (Schulze, 2003, hal. 262).

Dalam konteks negara, Darmansjah Djumala, memetakan cara Indonesia melakukan perundingan damai melalui beberapa langkah diplomasi. Dimulai dari pemerintahan Soeharto, menggunakan *hard power*. Setelah jatuhnya Rezim Soeharto cenderung dominan menggunakan *soft power* dalam mencapai kesepakatan bersama. Rentang masa yang dianalisis tersebut, pendekatan *soft power* merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan konflik dan tidak semestinya diselesaikan dengan kekerasan (Djumala, 2013, hal. 3).

Seturut dengan jurnal Damien Kingsbury, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia bermasalah dalam produk hukum saat itu dalam menyelesaikan

perdamaian dengan ASNLF. Di antaranya banyak undang-undang yang banyak memotong subsidi untuk produk berbasis minyak. Sehingga membuat perdebatan baru bagi legislatif dan pemerintah yang alih-alih berdampak pada fokus negara dalam menyelesaikan perjanjian damai dengan Aceh. Selain itu, unsur nasionalis dalam elit politik Jakarta lebih memilih militer untuk solusi politik dalam menyelesaikan konflik Aceh. Maka MoU Helsinki melegitimasi poin baru untuk pemerintah Indonesia yang nampaknya membawa TNI di bawah kendali sipil. Bahkan jika Aceh merasa dalam tekanan, cetak biru dalam perjanjian tersebut dapat digugat kembali (Kingsbury, 2005, hal. 88).

Sedangkan, Antje Missbach, menampil kajian mendalam mengenai pengaruh Diaspora Aceh di luar negeri dalam pembentukan ASNLF hingga pengaruh terhadap perundingan perdamaian. Membeberkan kegiatan penting Diaspora pra dan pasca konflik. Di antaranya sumbangsih Diaspora untuk perang dan perdamaian di Tanah Aceh. Termasuk berperan penting dalam dukungan dana dan sumbangan materil. Lalu, adanya dorongan sentrifugal dan sentripetal di Diaspora Aceh. Dimulai dari kekuatan demoralisasi dan kelelahan mereka hingga peningkatan persatuan dan semakin ketatnya kontrol terhadap Diaspora Aceh di luar negeri. Anggapan bahwa Diaspora apolitis dibantah dan dibuktikan dengan proses dediasporisasi setelah berakhirnya konflik. Bahkan ketidakhadiran mereka membuat penyesuaian ulang (*readjustment*) (Missbach, 2012, hal. 284).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat adanya kekuatan dan kelemahan pada kedua belah pihak dalam upaya penyelesaian konflik. Meskipun belum ada yang menjelaskan upaya kemerdekaan yang dilakukan oleh ASNLF pasca reformasi dan faktor-faktor yang menghambat, hingga indikator

kegagalannya. Padahal jika ditelisik secara mendalam dalam kajian akademis, masa tersebut negara lebih dominan menggunakan non-militeristik dalam membuka peluang negosiasi yang substantif atas kemerdekaan Aceh. Maka posisi penelitian ini adalah melengkapi kajian-kajian yang belum ada. Oleh karena itu, peneliti mengambil fokus pada analisis gerakan politik ASNLF dalam upaya memerdekakan Aceh dari Indonesia pada tahun 1999-2019.

1.7 Landasan Konseptual

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *Transnasional Advocacy Network* (TAN) milik Margaret Keck dan Kathryn Sikkink. Margaret (Keck & Sikkink, 1998) menjelaskan dalam karyanya tersebut bahwa politik dunia pada abad kedua puluh memiliki pola interaksi hubungan internasional yang melibatkan banyak aktor seperti, non-negara yang berinteraksi satu sama lain dan adanya hubungan kerjasama antar negara dengan organisasi internasional. Aktor non-negara tersebut disebut dengan *Transnational Advocacy Network* atau jaringan internasional. Jaringan ini memiliki signifikansi transnasional, regional, domestik dan melibatkan para ahli, ilmuwan serta aktivis. Jaringan advokasi transnasional bekerja sebagai pendorong proses integrasi regional dan internasional dengan membangun relasi antar aktor masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional.

Transnational Advocacy Network sudah ada sejak abad ke 19 untuk menghapus perbudakan dan kini mulai berkembang ke masalah yang lebih luas dan kompleks, jaringan ini biasanya muncul di beberapa situasi di antaranya :

- a. Terhambat atau terputusnya hubungan jaringan antar kelompok-kelompok domestik dan pemerintah, di mana jaringan ini tidak mampu atau kurang efisien dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang

terjadi. Kemudian organisasi tersebut menggunakan gerakan *boomerang pattern* untuk dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut.

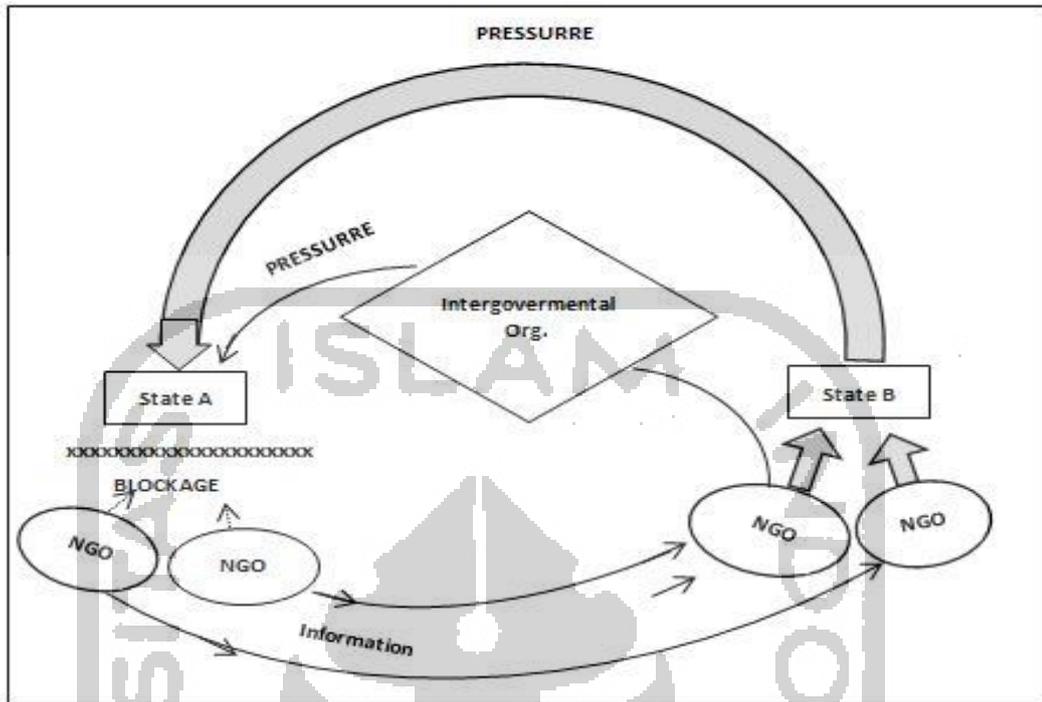
- b. Aktivistis, pengusaha atau politikus mereka percaya bahwa jaringan ini dapat memajukan visi dan kampanye mereka di kemudian hari dan secara aktif mempromosikannya.
- c. Konferensi internasional dan forum-forum komunikasi internasional, sebagai tujuan menciptakan, membentuk dan memperkuat jaringan.

Beberapa situasi ini yang merupakan momentum munculnya TAN.

Jaringan advokasi secara signifikan berperan dalam isu transnasional, regional dan domestik. Jaringan ini dapat menjadi kontributor utama dalam mencapai tujuan (konvergensi) dari norma sosial budaya. Lalu, dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional yang telah disepakati secara bersama maupun isu yang akan diangkat.

Jaringan ini mencakup aktor-aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu isu, yang diikat oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, pertukaran informasi dan hubungan timbal balik. Inti dari hubungan ini adalah kemampuan suatu aktor internasional untuk memobilisasi informasi strategis, menciptakan isu baru dalam membujuk, mendapatkan pengaruh yang lebih kuat serta pengaruh dari pemerintah (Keck & Sikkink, 1998, hal. 2).

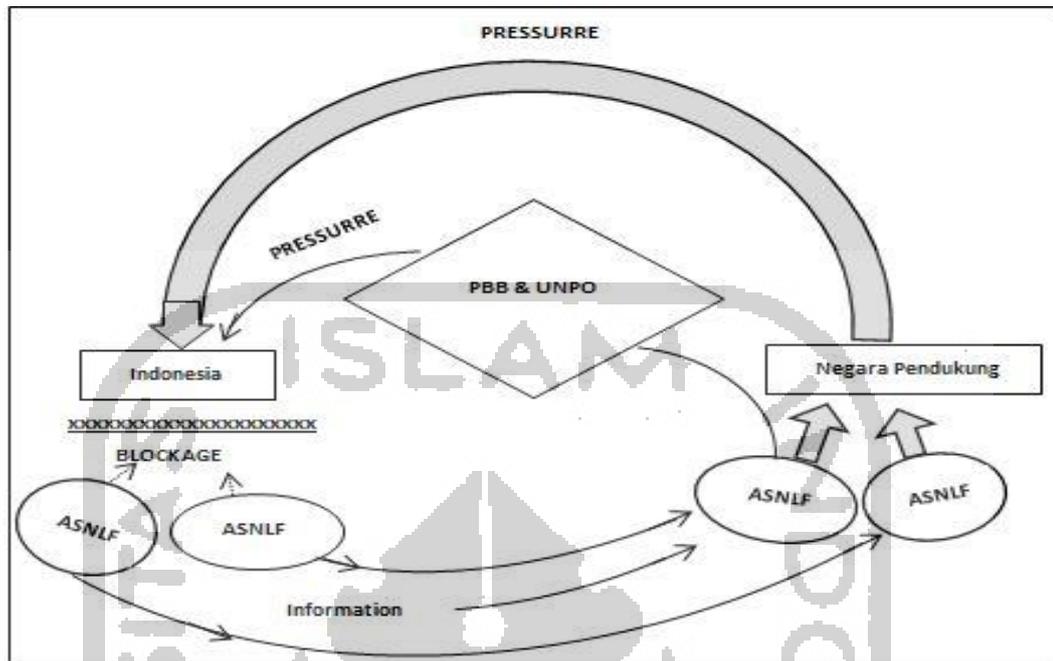
Gambar 1. Pola Bumerang TAN



Sumber: (Keck & Sikkink, 1998, hal. 13).

Pola ini biasanya digunakan dalam kampanye hak-hak manusia, di mana pemerintah dari suatu negara dirasa kurang responsif terhadap sebuah isu dan kelompok penyebar kampanye. Maka proporsional TAN berperan, untuk masuk dan membantu menyuarakan tuntutan masalah ini. Adapun, aplikasi visualisasi pola pada kasus ASNLF seperti ini.

Gambar 2. Pola Bumerang dalam Gerakan ASNLF



Sumber: (Gambar diolah dari Keck & Sikkink, 1998, hal. 13).

Selain itu, TAN sendiri memiliki 4 tipologi taktik yang dikembangkan dalam upaya mereka sosialisasi persuasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 16). Yaitu :

- a. Politik informasi : adalah kemampuan aktor TAN dalam membingkai sebuah informasi secara cepat dan kredibel pada tempat yang tepat dan memiliki dampak yang paling signifikan. Adapun, upaya ini telah dilakukan ASNLF dalam bentuk penghentian perundingan damai di Tokyo dan melakukan protes ke PBB atas masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh (Tempo, 2003). Maksud dari keinginan ASNLF menggagalkan perjanjian, secara sengaja digunakan demi disorot dengan signifikan oleh media internasional dan pihak asing lainnya, agar isu HAM akan jadi sentral tekanan terhadap pemerintah Indonesia (Aspinal & Crouch, 2003, hal. 46).

- b. Politik simbol : adalah kemampuan aktor TAN membuat simbol atau cerita yang masuk akal dari situasi atau klaim untuk audiensi yang jarang atau bahkan belum pernah melihatnya. Adapun, upaya ini telah dilakukan oleh ASNLF. Hasan Tiro sebagai wali negaranya, menuangkan kembali lambang *buraq-singa* sebagai simbol dan identitas negara Aceh pada masa silam. Lalu, simbol ini juga digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat dengan maksud untuk merdeka (Piliang, 2010, hal. 30).
- c. Politik *leverage* : adalah kemampuan aktor TAN memanggil aktor-aktor yang kuat dan berpengaruh dalam mempengaruhi situasi dimana aktor yang lemah tidak memiliki pengaruh yang kuat. Adapun, upaya ini telah dilakukan oleh ASNLF, dalam usahanya menarik dukungan dari negara adidaya seperti Amerika dan organisasi bangsa-bangsa (PBB), dengan mempresentasikan gagasan gerakan dan maksud ingin merdeka. Walau akhirnya hanya Libya yang mampu memberikan dukungan secara materiil (Schulze K. E., 2004, hal. 9).
- d. Politik akuntabilitas : adalah kemampuan TAN mewajibkan aktor-aktor yang kuat untuk bertindak berdasarkan prinsip atau kebijakan yang telah mereka dukung secara formal. Adapun, upaya ASNLF didukung secara formal oleh UNPO. Dengan bergabungnya menjadi anggota, sebagai bentuk dan alat untuk memperjuangkan kebebasan orang Aceh sambil menghindari konflik bersenjata di masa depan (UNPO, 2017).

Untuk menilai semua pengaruh jaringan diatas, Keck dan Sikkink memberikan lima kategori, yakni : (1) pembuatan isu dan perhatian atau setting agenda; (2) pengaruh sebuah jaringan pada posisi diskursif suatu negara atau

organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh pada prosedur kelembagaan (4) pengaruh terhadap perubahan kebijakan kepada ‘aktor target’ berupa negara, organisasi internasional, regional atau MNC; dan (5) pengaruh pada perilaku negara (Sikkink M. E., 1998, hal. 25).

Pada tingkatan yang lebih konkret, ASNLF belum mampu memenuhi kriteria penilaian pada poin (3) dan (4). Sebagaimana, dua poin tersebut merupakan resolusi kegagalan gerakan ini dalam mempengaruhi aktor internasional dan regional. Serta, mempengaruhi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Selebihnya, data-data empiris telah membuktikan bahwa (1) setting agenda, (2) posisi diskursif, maupun (5) perilaku negara telah berdampak signifikan terhadap proses yang dilakukan oleh ASNLF.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam Metode Penelitian Kualitatif. Seara definisi metode kualitatif adalah sebuah metode yang memiliki hasil berupa penjelasan atau naratif (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, p. 7). Penjelasan tersebut akan didasarkan pada data atau temuan yang sudah didapat dari opini, perilaku ataupun kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait upaya ASNLF dalam memerdekakan Aceh dari Indonesia pada tahun 1999-2005. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar nantinya memberikan penjelasan yang deskriptif terhadap kegagalan ASNLF.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) sebagai aktor utama dalam upayanya

memerdekakan Aceh dari Indonesia.

1.8.3 Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penggabungan dua pemungutan data bersifat sekunder dan primer. (Zed, 2004, p. 2). Menggabungkan antara studi literatur (data sekunder) dan wawancara (data primer). Sementara itu, dua metode ini mengharuskan untuk mengumpulkan data-data pustaka yaitu buku, jurnal, website, laporan dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah semua dilakukan, akan diolah menjadi tulisan yang deskriptif. Adapun metode ini mempunyai kelemahan dalam pencarian data yang berkaitan, namun dapat diatasi dengan proses pencarian yang komprehensif (Zed, 2004, p. 10).

1.8.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, dibahas melalui empat metode analisis data. *Pertama*, bab 1 sebagai penjelasan mengenai latar belakang penelitian. Dengan begitu tujuan penelitian, cakupan penelitian sampai rumusan masalah dan lainnya akan dijabarkan dalam bab ini. *Kedua*, bab 2 sebagai tampilan mengenai data-data yang dibutuhkan secara rinci. Sehingga nantinya akan menunjang bab selanjutnya. *Ketiga*, bab 3 sebagai penjabaran analisis yang dilandaskan pada data-data yang telah ditulis dalam bab sebelumnya. *Keempat*, bab 4 digunakan untuk dipersimpulkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan.

1.8.5 Proses Penelitian

Dalam prosesnya, penulis akan memfokuskan terhadap kerangka konseptual, yang mana akan membantu banyak dalam menganalisis penelitian skripsi ini.